

Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Cimahi

Salsabila Ar-Ruum Sayoga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: salsabila19027@mail.unpad.ac.id

Ivan Yudianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Abstract. *The accountability of regional property management is something that must be proven in reality for the obligations carried out by the agency. Leadership commitment is one of the factors to realise the accountability of regional property management, for a high sense of involvement and loyalty to the organisation, the leader will obey the spoken commitment. Likewise, the competence of the apparatus seen from the ability, expertise, knowledge, and attitude of responsibility for their duties can realise the accountability of the management of regional property. The purpose of this study was to determine whether the Commitment of Leaders and Apparatus Competence to the Accountability of Regional Property Management in Cimahi City (Research on the Cimahi City Regional Work Unit). This research uses Quantitative Methods with descriptive and verification approaches (Path Analysis). The sampling technique used a saturated sample technique, obtained 30 respondents from each Cimahi City Regional Work Unit. Data collection was carried out by distributing questionnaires to the Head of Service as the Goods User and Employees who served as the Goods Manager of each Regional Work Unit. The results of this study indicate that, leadership commitment has a positive but insignificant effect on the accountability of regional property management, apparatus competence has a positive and significant effect on the accountability of regional property management, and leadership commitment has a positive but insignificant effect on the accountability of regional property management mediated through apparatus competence.*

Keywords: *Accountability of Regional Property Management, Leadership Commitment, Apparatus Competence.*

Abstrak. Akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah merupakan hal yang harus dibuktikan secara nyata atas kewajiban yang dilaksanakan oleh instansi. Komitmen pimpinan merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, atas rasa keterlibatan dan loyalitas yang tinggi pada organisasi, pimpinan akan taat atas komitmen yang diucapkan. Begitupun dengan kompetensi aparatur dilihat dari kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan sikap tanggung jawab terhadap tugasnya dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Cimahi (Penelitian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi). Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif (*Path Analysis*). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, diperoleh 30 responden dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Barang dan Pegawai yang menjabat sebagai Pengurus Barang dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, komitmen pimpinan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, dan komitmen pimpinan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yang dimediasi melalui kompetensi aparatur.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, Komitmen Pimpinan, Kompetensi Aparatur.

LATAR BELAKANG

Lembaga pemerintahan yang baik ialah yang mewujudkan sistem good governance untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan suatu sistem politik pemerintahan, yang berorientasi pada kepentingan publik berdasarkan prinsip demokrasi. Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan dalam mewujudkan good governance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Adapun penyebab akuntabilitas tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan kurangnya pemahaman dan kualitas sumber daya manusia, gaji yang diperoleh rendah, menurunnya nilai moral pada individu, hambatan dari perbedaan budaya, teknologi yang belum diperbaharui, sistem akuntansi yang lemah, masih memiliki mental inlander, lemahnya penerapan akuntabilitas, permasalahan antar kelembagaan, manajemen yang dilakukan dengan kehendak diri sendiri, kurang fleksibelnya birokrasi, kekuasaan yang masih didominasi oleh pihak tertentu, kebijakan hukum yang belum terlalu kuat, dan lingkungan yang kurang mendukung (Sedarmayanti, 2013). Untuk mewujudkan akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kriteria Standar Akuntansi Pemerintahan, pengungkapan informasi yang memadai, taat pada peraturan perundang-undangan, dan keefektifan dari sistem pengendalian intern (L.I, 2020). Laporan keuangan yang telah disusun nantinya akan diaudit serta diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 terdapat empat kategori opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan menolak memberikan opini.

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Fitrah dan Ria, 2022). Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai peran yang krusial sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, karena penerapan dari pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk kedalam hal yang kompleks dan sering terjadi permasalahan terkait dengan aset-aset milik pemerintah (Fitrah dan Ria, 2022). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian,

Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian.

Dalam pemerintahan diperlukan aset-aset yang memiliki fungsi untuk menunjang jalannya kegiatan operasional pemerintah dan juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Amrie dan Rahmat, 2021). Aset-aset tersebut dalam pemerintahan sering disebut sebagai Barang Milik Daerah, tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli oleh pemerintah berdasarkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan juga didapatkan dari perolehan lainnya yang sah. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga serta mengelola barang yang berada di bawah penguasaannya. Penatausahaan yang profesional dengan cara yang modern dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, dengan harapan agar masyarakat percaya akan pelaksanaan tugas pemerintah dalam mengelola keuangan dan aset daerah (Erfin, I nyoman, dan Kusworo, 2019). Penyebab pengelolaan aset yang masih buruk menurut (Nunuy Nur Afiah, 2010), adalah lemahnya pengamanan atas aset, sistem dokumentasi aset yang tidak memadai, tidak tepat dan akuratnya pencatatan atas mutasi aset, kurangnya pemahaman yang dimiliki pegawai, terjadinya perputaran pegawai aset tanpa ada pemberian data serta informasi secara rinci, rendahnya kebijakan dan komitmen pimpinan dari sisi manajemen aset, serta ketidakselarasan antara bidang akuntansi serta pengelolaan aset sehingga menyebabkan perbedaan antara neraca dengan daftar aset.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi merupakan entitas yang diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 2013 sampai 2022, Kota Cimahi selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan dibantu oleh usaha dan kerja keras dari berbagai pihak (Adhy Rahadhy, 2023). Namun dalam hasil laporan pemeriksaan BPK, masih terdapat penekanan atau catatan-catatan yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Kota Cimahi, seperti yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 ditemukan satu penekanan mengenai aset tanah yang masih belum jelas status kepemilikannya.

Selain itu hasil peninjauan awal yang dilakukan oleh peneliti, bersumber dari data primer dan juga data sekunder, ditemukan permasalahan dari beberapa siklus pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kota Cimahi yaitu mengenai pemanfaatan barang milik daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 terdapat pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang salah satunya bersumber dari penggunaan rumah susun sewa. Dari keterangan tersebut, pemungutan retribusi pada objek rumah susun sewa sudah ada dalam objek retribusi jasa usaha pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012, namun dalam Laporan Keuangan tahun 2019 rumah susun sewa belum dicatat sebagai piutang retribusi karena keterbatasan SDM pengelola rusun dan peraturan tentang pengelolaan rumah susun sewa yang belum mendukung. Mulai dicatat sebagai piutang retribusi dari tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.

Permasalahan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Selanjutnya mengenai permasalahan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, dari data yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang A, terdapat 51% dari total keseluruhan bidang tanah milik Kota Cimahi belum memiliki sertifikat yang sah atau masih dalam proses pensertifikatan melalui Badan Pertanahan Nasional. Pada Kartu Inventaris Barang C juga terdapat banyak Barang Milik Daerah dengan kategori gedung dan bangunan yang belum memiliki dokumen gedung yang lengkap. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat mengakibatkan Barang Milik Daerah diakui atau diambil alih kepemilikannya oleh pihak dan menyebabkan kerugian atas Barang Milik Daerah. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Kota Cimahi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun terdapat satu penekanan mengenai Barang Milik Daerah berupa tanah dalam penguasaan TNI AD dan tercatat pula dalam Neraca Pemerintah Kota Cimahi. Oleh karena itu harus dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian atas status kepemilikan tanah tersebut dan menghindari double catat dalam laporan keuangan masing-masing.

Dari permasalahan tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kota Cimahi belum sepenuhnya menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Bab VIII mengenai Pengamanan Dan Pemeliharaan, dalam aturan tersebut menyatakan bahwa

diwajibkan untuk seluruh barang milik daerah untuk dilakukan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum, serta dilakukan pemeliharaan guna menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terdapat permasalahan mengenai penghapusan Barang Milik Daerah Kota Cimahi. Terhambatnya kegiatan penghapusan dikarenakan banyak kendala seperti Barang Milik Daerah yang tidak jelas keberadaannya. Permasalahan lain dari siklus penghapusan yaitu barang yang diusulkan untuk dihapuskan tidak memiliki dokumen penunjang yang lengkap. Adapun Barang Milik Daerah yang memang sudah hilang fisiknya karena kelalaian pegawai, dalam kasus ini maka usulan penghapusan tidak akan ditindak lanjuti dan harus melalui prosedur tuntutan ganti rugi.

Permasalahan tersebut merupakan tindakan yang melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pada Bab XII mengenai Penghapusan, karena tidak memenuhi persyaratan untuk proses penghapusan barang milik daerah. Apabila ingin melakukan penghapusan pada barang milik daerah yang hilang, dicuri, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan serta tanaman, dan juga dalam keadaan kahar harus melengkapi persyaratan yang tertera dalam peraturan, setelah itu barang diperbolehkan untuk dihapuskan.

Berikutnya permasalahan mengenai penatausahaan barang milik daerah, menurut Barkah selaku Anggota Komisi II DPRD dalam website yang ditulis oleh (Laksmi Sri Sundari, 2021) banyak Barang Milik Daerah Kota Cimahi yang masih belum tercatat dalam pembukuan dan Kartu Inventaris Barang, dengan kasus seperti pembelian bidang tanah milik Pemerintah Kota Cimahi dalam bentuk Tanah Pemakaman Umum yang terletak di Kecamatan Cimahi Utara. Kasus serupa berikutnya yaitu aset pemerintah yang terletak di daerah Cibereum, dikarenakan aset tidak terdata maka akhirnya aset tersebut diambil alih penguasaannya oleh pihak lain dan kemudian menimbulkan sengketa. Hal tersebut terjadi karena kelalaian dari para pegawai pemerintah Kota Cimahi.

Permasalahan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pada Bab XIII tentang Penatausahaan, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seluruh barang milik daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang harus terdaftar dan tercatat di dalam Daftar Barang.

Hasil riset yang dilakukan oleh (Hanis, dkk, 2011) mengenai faktor yang menghambat pengelolaan aset daerah salah satunya adalah belum komprehensifnya kerangka kebijakan yang diputuskan atau ditetapkan oleh pimpinan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Galib L, 2021) juga menyebutkan bahwa komitmen pimpinan yang lemah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh menghambat siklus dari barang milik daerah. Pimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam pengambilan segala keputusan dari berbagai siklus pengelolaan barang milik Daerah, maka dari itu diperlukannya seorang pemimpin yang memiliki loyalitas, ketegasan serta kedisiplinan terhadap komitmennya dan pemimpin yang taat serta patuh akan undang-undang yang berlaku agar dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pegawainya. Seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 19 Tahun 2016, Pasal 12, Ayat 3a – 3j bahwa Pejabat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang memiliki peran dan kewenangan yang penting atas pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah.

Tidak hanya komitmen pimpinan yang menyebabkan permasalahan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mardiasmo, 2012) terbatasnya kapabilitas sumber daya manusia yang mengelola aset juga dapat menimbulkan permasalahan. Begitupun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Fitrah dan Ria A, 2022) kualitas aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah karena aparatur memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah. Aparatur yang memiliki kualitas tinggi akan mampu menggerakkan suatu instansi dalam mengoptimalkan aset untuk menunjang kegiatan operasional dan dapat bertanggung jawab kepada masyarakat atas Barang Milik Daerah yang dikelolanya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 16, Ayat 2a – 2r, menjabarkan tentang kewenangan dan pertanggungjawaban dari aparatur pengurus barang pengguna, dapat dilihat bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan barang milik daerah.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh komitmen pimpinan dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah Kota Cimahi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana metode ini menganut aliran positivisme (Hardani., dkk, 2020 : 39). Berfokus pada pengkajian fenomena secara objektif, peneliti harus berperan sebagai *value reasearcher* yang memisahkan nilai subjektif dengan fakta objektif (Mufid, 2009). Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dalam metode penelitian kuantitatif seluruh variabel pada judul penelitian yang menjadi sasaran ilmiah disebut sebagai objek penelitian. Adapun objek yang diteliti pada penelitian ini yaitu Akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah pada Kota Cimahi yang dipengaruhi oleh komitmen pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan kompetensi aparatur satuan kerja perangkat daerah. Adapun subjek yang ditentukan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Kota Cimahi.

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Kota Cimahi sejumlah 30 SKPD. Menurut (Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan, 2020 : 12) yang dimaksud dengan sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. (I ketut Swarjana, 2022: 13), mendefinisikan bahwa sampel sebagai bagian dari populasi yang terpilih karena telah sesuai dengan kriteria melalui bergabai proses penyeleksian dari populasi awal.

Dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh, maka seluruh populasi yang terdiri dari 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dijadikan sampel. Responden yang dipilih dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah yaitu Pengguna Barang (Kepala Satuan Kerja) dan Pengurus Barang (Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah).

Sumber data penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Dalam memecahkan persoalan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Teknik analisis data penelitian ini dengan bantuan *software Statistical Program for Social Science 29*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

Hasil Uji Validitas

Korelasi product moment dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) $\geq 0,3061$ (r_{tabel}). Nilai r_{tabel} diperoleh dari tabel pengujian satu arah dengan tingkat signifikansi 0,05 dengan jumlah responden sebanyak 30. Uji validitas ini dilakukan pada masing-masing variabel yang ada dalam penelitian ini, variabel tersebut terdiri dari Komitmen Pimpinan (X_1), Kompetensi Aparatur (X_2), dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y).

Berdasarkan perhitungan dari *software Statistical Program For Social Science 29*, diperoleh hasil bahwa semua item pernyataan pada variabel Komitmen Pimpinan (X_1) memiliki nilai $r_{hitung} > 0,3061$ dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Komitmen Pimpinan (X_1) adalah valid. Maka 17 butir pernyataan memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat dijadikan alat ukur untuk mengukur variabel Komitmen Pimpinan (X_1).

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 1. Rangkuman Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Kesimpulan
Komitmen Pimpinan.	0,899	17	Reliabel
Kompetensi Aparatur.	0,880	16	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.	0,818	14	Reliabel

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah.

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa semua item pernyataan yang dipergunakan sudah reliabel sehingga kesimpulan yang didapat adalah item pernyataan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur Komitmen Pimpinan (X_1), Kompetensi Aparatur (X_2), dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y) karena sudah memberikan hasil yang konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan rumus *Shapiro-Wilk* dikarenakan sampel atau responden dalam penelitian ini jumlahnya dibawah 50, yaitu hanya berjumlah 30 responden. Pengujian *Shapiro-Wilk* menggunakan *software Statistical Program For Social Science 29*. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan uji normalitas *Shapiro-Wilk* :

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Komitmen Pimpinan (X1)	,096	30	,200 [*]	,954	30	,217
Kompetensi Aparatur (X2)	,109	30	,200 [*]	,954	30	,219
Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y)	,127	30	,200 [*]	,950	30	,168

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas (SPSS 29)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas untuk variabel Komitmen Pimpinan (X₁) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Pada variabel Kompetensi Aparatur (X₂) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari setiap variabel independen dan dependen lebih besar dari 0,05, angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh data dari setiap variabel independen dan dependen sudah memenuhi uji asumsi klasik yang berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) <10.000 maka dapat dikatakan tidak timbul multikolinearitas. Dengan bantuan *Statistical Program For Social Science 29* diperoleh hasil sebagai berikut :

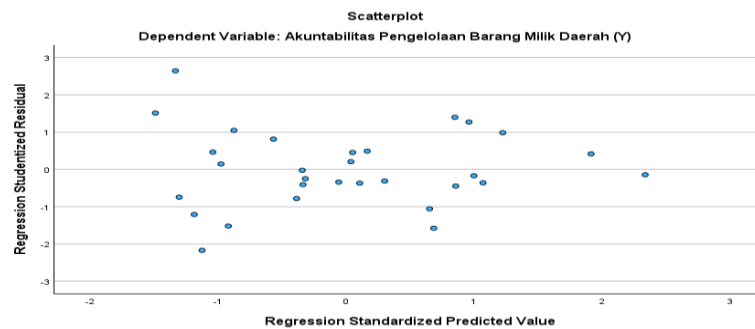
Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	24,475	7,080		3,457	,002		
	Komitmen Pimpinan (X1)	,004	,085	,005	,044	,965	,953	1,050
	Kompetensi Aparatur (X2)	,565	,091	,774	6,209	<,001	,953	1,050

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y)

Gambar 2. Hasil Uji Multikolinearitas (SPSS 29)

Dari output tersebut dapat dilihat bahwa nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* kurang dari 10.000 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam data.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Scatterplot .

Hasil dari pengolahan data dengan menggunakan grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Namun tidak ada pola yang jelas atau pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola menyebar, menyempit, maupun bergelombang. Dapat disimpulkan bahwa model ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Path Analysis

Hubungan Antar Variabel

Correlations				
		Komitmen Pimpinan (X1)	Kompetensi Aparatur (X2)	Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y)
Komitmen Pimpinan (X1)	Pearson Correlation	1	,218	,174
	Sig. (1-tailed)		,124	,179
	N	30	30	30
Kompetensi Aparatur (X2)	Pearson Correlation	,218	1	,775**
	Sig. (1-tailed)	,124		<,001
	N	30	30	30
Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y)	Pearson Correlation	,174	,775**	1
	Sig. (1-tailed)	,179	<,001	
	N	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Gambar 4. Hasil Uji Kolerasi Antar Variabel (SPSS 29)

Gambar 4, menunjukkan nilai koefisien korelasi antar variabel Komitmen Pimpinan (X_1), Kompetensi Aparatur (X_2), dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y). Angka koefisien korelasi yang positif dapat diartikan bahwa antar dua variabel tersebut memiliki hubungan yang berbanding lurus. Jika salah satu variabel terdapat peningkatan maka variabel lainnya juga akan mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, apabila salah satu variabel mengalami penurunan, maka variabel lainnya juga akan ikut menurun.

Berikut merupakan interval koefisien untuk menentukan tingkat kekuatan hubungan antar variabel :

Tabel 2. Interval Koefisien.

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Koefisien Jalur X Terhadap Y

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	24,475	7,080		,002
	Komitmen Pimpinan (X_1)	,004	,085	,005	,965
	Kompetensi Aparatur (X_2)	,565	,091	,774	<,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y)

Gambar 2. Hasil Koefisien Pengaruh X terhadap Y (SPSS 29)

Berdasarkan output 5, Koefisien jalur dari Komitmen Pimpinan terhadap (X_1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y) adalah sebesar (p_{yx2}) 0,005. Koefisien jalur merupakan bobot pengaruh langsung variabel Komitmen Pimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nilai koefisien pengaruh yang diperoleh bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh Komitmen Pimpinan berbanding lurus dengan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana jika Komitmen Pimpinan semakin tinggi, maka Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah akan semakin meningkat.

Koefisien Determinasi X Terhadap Y

Hasil perhitungan koefisien determinasi untuk model struktural yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut yang diolah menggunakan software SPSS 29 :

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,775 ^a	,601	,571	4,456186

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur (X₂), Komitmen Pimpinan (X₁)

Gambar 3. Hasil Uji Koefisien Derminasi X₁, X₂, terhadap Y

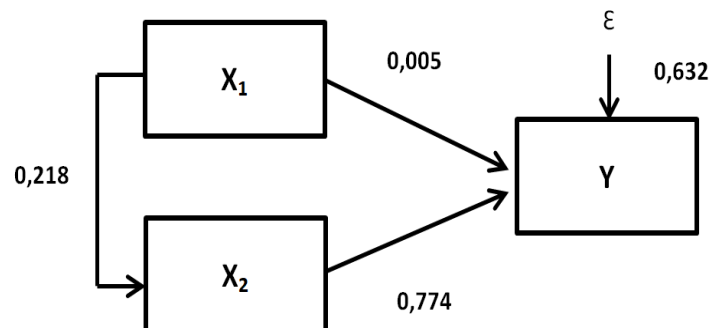
Dari hasil perhitungan Gambar 6, diperoleh koefisien determinasi Komitmen Pimpinan (X₁) dan Kompetensi Aparatur (X₂) adalah sebesar 0,601. Besarnya pengaruh secara bersama-sama antara Kompetensi Aparatur, Komitmen Pimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 60,1% . Koefisien jalur variabel lain di luar Kompetensi Aparatur dan Komitmen Pimpinan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$P_{ye} = \sqrt{(1 - 0,601)} = 0,632$$

Hasil analisis jalur dapat dibuat dalam persamaan struktural untuk pengaruh Kompetensi Aparatur dan Komitmen Pimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

$$Y = 0,005 X_1 + 0,774 X_2 + 0,632$$

Secara visual diagram jalur Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. Diagram Path Model Struktural Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,475	7,080		3,457	,002
	Komitmen Pimpinan (X1)	,004	,085	,005	,044	,965
	Kompetensi Aparatur (X2)	,565	,091	,774	6,209	<,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y)

Gambar 9. Hasil Uji Parsial (SPSS 29)

$t_{hitung} = n$ (jumlah responden) – k (jumlah variabel bebas) – 1 = 27. Dilihat pada tabel t_{hitung} menggunakan pengujian satu arah dengan df 27 dan signifikansi 0,05 maka didapat angka t tabel sebesar 1,703.

Tabel 5. Rangkuman Uji t

Hipotesis	Nilai Signifikansi Variabel X Terhadap Y	alpha	t_{hitung}	t_{tabel}	Kesimpulan
H ₂	< 0,001	0,05	6,209	1,703	Positif dan Signifikan. H _{a(2)} diterima.

Sumber : Hasil Pengolahan Data.

Pada hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 dan t_{hitung} lebih tinggi dari t_{tabel} , maka disimpulkan H₀₍₂₎ ditolak dan H_{a(2)} diterima. Secara parsial Kompetensi Aparatur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Besaran Pengaruh secara langsung yang diberikan oleh variabel Kompetensi Aparatur terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 59,9%. Berikut merupakan tabel yang berisi rumus beserta perhitungannya:

Tabel 6. Perhitungan Besaran Pengaruh Langsung Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BMD

Varian	Interpretasi Analisis Jalur	Perhitungan	Besaran Pengaruh (%)
Kompetensi Aparatur	Pengaruh Langsung.	$\rho_{yx1}^2 = 0,774^2$ $= 0,599$	59,9%

Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Kompetensi Aparatur

Setelah memperoleh nilai koefisien jalur, selanjutnya mencari seberapa besar pengaruh yang diberikan baik secara langsung dan juga secara tidak langsung dari Komitmen Pimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berikut merupakan tabel perhitungan pengaruh secara langsung dan tidak langsung.

Tabel 7. Perhitungan Besaran Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BMD Secara Langsung Dan Tidak Langsung.

Varian	Interpretasi Analisis Jalur	Perhitungan	Besarnya Pengaruh (%)
Komitmen Pimpinan	Pengaruh Langsung.	$\rho_{yx1}^2 = 0,005^2$ $= 0,00003$	0,003%
	Pengaruh Tidak Langsung.	$\rho_{yx1} . \rho_{yx1x2} . \rho_{yx2}$ $= 0,774 . 0,218 . 0,005$ $= 0,00084$	0,084%
Total Pengaruh			0,087%

Dari tabel 5, dapat kita ketahui bahwa pengaruh langsung Komitmen Pimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y) sebesar 0,003%, sedangkan pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Kompetensi Aparatur adalah sebesar 0,084%. Maka total pengaruh yang diberikan variabel Komitmen Pimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebesar 0,087%. Artinya apabila Komitmen Pimpinan didukung dengan Kompetensi Aparatur maka pengaruhnya dapat meningkat sebesar 0,084% untuk

mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih baik. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa $H_{0(3)}$ diterima dan $H_{a(3)}$ ditolak karena pengaruh yang diberikan oleh Komitmen Pimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Kompetensi Aparatur tidak signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0,044 dan nilai t_{tabel} yang diperoleh sebesar 1,703, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai signifikansi $0,965 > 0,05$, maka $H_{0(1)}$ diterima dan $H_{a(1)}$ ditolak, dengan demikian hasil pengujian tersebut bernilai positif namun komitmen pimpinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Korelasi yang dihasilkan oleh komitmen pimpinan dengan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sebesar 0,174 jika dilihat dalam interval koefisien termasuk kedalam kategori sangat rendah dan positif.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hasil uji statistik menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 6,209 dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang hanya 1,703, maka dengan demikian $H_{0(2)}$ ditolak dan $H_{a(2)}$ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Korelasi yang dihasilkan oleh kompetensi aparatur dengan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sebesar 0,775 jika dilihat dalam interval koefisien termasuk kedalam kategori kuat dan positif. Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur, besaran pengaruh langsung yang diberikan oleh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sebesar 59,9%, maka kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Kompetensi Aparatur

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan path analysis, besaran pengaruh langsung yang dihasilkan oleh komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yaitu sebesar 0,003%, apabila dimediasi oleh kompetensi aparatur

maka pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sebesar 0,084%. Maka total pengaruh yang dihasilkan setelah dimediasi oleh kompetensi aparatur sebesar 0,087%, hasil tersebut berpengaruh positif namun tidak signifikan. Korelasi antara variabel komitmen pimpinan dengan variabel kompetensi aparatur sebesar 0,218, jika dilihat dalam interval koefisien termasuk kedalam kategori yang rendah. Angka positif yang diperoleh memberi arti bahwa variabel tersebut berbanding lurus, apabila salah satu variabel mengalami peningkatan, maka variabel lainnya juga akan mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, namun pengaruh yang diberikan tidak signifikan. Hasil tersebut dibuktikan oleh pengujian hipotesis dan perhitungan path analysis untuk melihat korelasi antara variabel komitmen pimpinan dengan variabel akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah serta untuk menghitung besaran pengaruh yang diberikan oleh komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Dari hasil uji statistik secara parsial diperoleh nilai $t_{hitung} 0,044 < t_{tabel} 1,703$ dan nilai signifikansi $0,965 > 0,05$. Korelasi antar variabel sebesar 0,174 dimana hasil tersebut tergolong kedalam kategori sangat rendah. Besaran pengaruh langsung yang diberikan oleh komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yaitu 0,003%.
2. Kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Hasil tersebut dibuktikan oleh pengujian hipotesis dan perhitungan menggunakan path analysis untuk melihat korelasi antara variabel kompetensi aparatur dengan variabel akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah serta untuk menghitung besaran pengaruh yang diberikan oleh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Dari hasil uji statistik secara parsial diperoleh nilai $t_{hitung} 6,209 > t_{tabel} 1,703$ dan nilai signifikansi $0,001 > 0,05$. Korelasi antar variabel sebesar 0,775 dimana hasil tersebut tergolong kedalam kategori kuat. Besaran pengaruh

langsung yang diberikan oleh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yaitu 59,9%.

3. Pengaruh yang diberikan oleh komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah melalui kompetensi aparatur memiliki hasil yang positif namun tidak signifikan. Hasil tersebut dibuktikan oleh pengujian hipotesis dan perhitungan path analysis untuk melihat korelasi antara variabel komitmen pimpinan dengan variabel kompetensi aparatur serta untuk menghitung besaran pengaruh yang diberikan oleh komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah melalui kompetensi aparatur. Korelasi antar variabel sebesar 0,218 dimana hasil tersebut tergolong kedalam kategori rendah. Besaran pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah melalui kompetensi aparatur sebesar 0,084%. Besaran pengaruh langsung yang diberikan dari komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah hanya sebesar 0,003%, setelah ditambah perhitungannya dengan pengaruh tidak langsung yang melalui kompetensi aparatur maka total besaran pengaruhnya meningkat menjadi 0,087%.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, Ellyana. T. (2016). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Barang Milik Negara Satuan Kerja Dan Komitmen Pimpinan Satuan Kerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara. (Penelitian Pada Satuan Kerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). (Tesis Magister, Universitas Padjadjaran).
- Anjelita. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Barang Milik Negara, Gaya Kepemimpinan Transformasional, dan Implementasi Pengendalian Internal Atas BMN Terhadap Kualitas Laporan BMN. (Tesis Magister, Universitas Padjadjaran).
- Afiah, Nunuy N. (2010). Akuntansi Pemerintahan : Implementansi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kencana. Jakarta.
- Firmansyah, A dan Rahmat H. (2021). Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi : Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*. Vol. 6 (2) : 177 – 193.
- Harahap, M. Guffar., Adi Muhammad. N. I., dkk. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia. PT. Sada Kurni Pustaka.
- Hardani., dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu.
- Haryanto, Erfin., I Nyoman., dan Kusworo. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Vol. 11 (4) : 551 – 567.
- Kumalasari, Deti dan Ikhsan Budi Riharjo, (2016). Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal*. Vol.5 (11) : 1-15.
- Lahada, Galib. (2021). Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*. Vol. 16 (1) : 34 – 42.
- L,I. (2020, 13 Juli). Ragam Opini BPK. Diakses pada 11 Juni 2023, dari : <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. CV. Andi Offset.
- Mufid, Muhammad. 2009. Etika dan Filsafat Komunikasi. Yogyakarta: Kencana.
- Rahadhyan, Adhy. (2023, 16 Mei). Kembali Raih Predikat Opini WTP, Pj.Wali Kota Cimahi Minta ASN Pertahankan Kinerjanya. Diakses pada 11 Juni 2023, dari : <https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/82162-kembali-raih-predikat-opini-wtp,-pj.-wali-kota-cimahi-minta-asn-pertahankan-kinerjanya>
- Riyanto, S dan Aglis Andhita H. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Ramadhani, Fitrah dan Ria A. (2022). Kualitas Aparatur, SIMDA-BMD, Regulasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*. Vol. 2 (1) : 275 – 290.

- Sedarmayanti. (2013). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran, Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta. PNRI.
- Swarjana, I Ketut. (2022). Populasi-Sampel Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian. CV Andi Offset
- Wahyuni, Sri., Isti Fadah., dan Diana S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jurnal Vol. 12 (1) : 66 – 80.